

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEPALA DESA KULANGO
DALAM PENGELOLAAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA
DI KECAMATAN LIPUNOTO KABUPATEN BUOL**

Pariyati¹ Munirah Ramadhani²

^{1,2}*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palu
(Email Korespondensi.pariyati24@gmail.com)*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana manajemen kepala desa Kulango dalam pengelolaan sumber pendapatan desa Lipunoto di Kecamatan Buol. Penelitian ini bersifat deskriptif survei, data yang diperoleh melalui pendekatan kualitatif kemudian dianalisis dan diolah secara kualitatif dengan menggunakan tabel frekuensi dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan sumber daya – sumber pendapatan desa agar dapat mewujudkan tujuan program pembangunan perlu dukungan yang besar, serius dan nyata dari seluruh masyarakat. Dengan kata lain, dalam persoalan pengelolaan sumber daya – sumber pendapatan desa bukan hanya menjadi beban dan tanggung jawab pemerintah desa atau kepala desa saja, melainkan juga seluruh masyarakat. Namun demikian, sebaik apapun manajemen kepala desa dalam bentuk perencanaan program, pelaksanaan kerja, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa, tidak akan mencapai hasil yang maksimal apabila tidak didukung oleh masyarakat.

Kata Kunci: Manajemen, Kepala Desa, Sumber Pendapatan Desa

ABSTRACT

The purpose of this study to determine the extent to which management Kulango village heads in the management of revenue sources Lipunoto village in the district of Buol district. Basic research is descriptive survey, data obtained through a qualitative approach is then analyzed and processed qualitatively by using frequency tables and percentages.

The results showed in the management of resources - rural income sources in order to realize the objectives of development programs need to support a large, serious and real than the whole society as well. In other words, in resource management issues - the source of village income is not only a burden and responsibility of government village or the village head alone, but also of the whole society. However the good management of village head in the form of program planning, work execution, supervision conducted by the village government, it would not achieve maximum results when not supported by the community.

Keywords, Management, Head of Village, Village Revenue Sources

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan di desa dapat terlaksana dengan baik dengan indikasi jika dapat memanfaatkan sumber-sumber pendapatan desa dalam hal ini adalah sumber daya alamnya di tunjang kemampuan sumber daya manusianya, baik melalui potensi wisata, iuran warga serta kemampuan memanfaatkan lahan pertanian menjadi sumber pendapatan desa, Potensi alam desa yang dimiliki dapat dijadikan budget dalam menyusun skala prioritas dalam pelaksanaan pembangunan di desa, Dengan demikian pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa memerlukan suatu penataan pengelolaan yang baik dan profesional, jika di tunjang oleh kemampuan sumber daya manusianya seperti Kepala Desa beserta aparatnya, dan lembaga-lembaga pemberdayaan desa, hal ini dimaksudkan agar seluruh sumber-sumber pendapatan desa dapat di gunakan secara maksimal untuk pelaksanaan pembangunan, Untuk mencapai hal tersebut sekali lagi diperlukan adanya penataan fungsi pengelolaan dengan keberpihakan kepada seluruh masyarakat.

Kepala desa sebagai seorang pemimpin akan memainkan peranan yang sangat dominan dalam kehidupan masyarakat desanya, peranan tersebut

sama sekali tidak mengurangi peranan aparatnya, apalagi mengabaikan pentingnya peranan yang perlu dan harus dimainkan oleh para aparat desa, akan tetapi aparat desa perlu dibimbing, dibina, diarahkan, dan digerakkan sedemikian rupa sehingga mau dan mampu mengerahkan tenaga, waktu dan ketrampilannya bagi kepentingan desa.

Peranannya yang dominan itu nampak lebih jelas lagi apabila dikaitkan dengan dengan keharusan berinteraksi dengan lingkungan yang selalu berubah dan berkembang, antara lain karena kemajuan pesat yang terjadi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan yang sangat cepat itu pada dirinya mengandung tantangan dan peluang, maka perkembangan tersebut juga harus dimanfaatkan di samping tentu saja harus diantisipasi segala pengaruh yang menghambat tujuan pembangunan tersebut. Unsur kepala desa yang diharapkan mempunyai kelebihan dibandingkan dengan para aparat desa untuk menjawab tantangan tersebut, Sehingga di dalam setiap pemerintahan desa, dengan terjadinya perubahan-perubahan kondisi, pergeseran dan timbul pertentangan-pertentangan, terjadi kesalahan-kesalahan yang perlu dibetulkan, dan muncul hal-hal yang tidak terduga sama sekali

sebelumnya, menghadapi perkembangan atau masalah semacam itu memerlukan peranan kepala desa yang cepat dan tepat agar pemerintahan desa dapat berjalan lancar.

Demikian halnya dalam pengelolaan sumber – sumber pendapatan desa, kepala desa harus mempunyai strategi yang baik dalam bentuk manajemen yaitu suatu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sehingga pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa dapat berjalan dengan efisien dan efektif sesuai dengan harapan masyarakat desanya, Peranan Kepala Desa dalam bentuk manajemen sangat menentukan bagi pembangunan desa, dengan melihat potensi sumber daya yang dimiliki desa seyogyanya dapat menunjang pembangunan desa.

Berbagai hambatan dan masalah yang timbul mengakibatkan tidak efisiennya pengelolaan sumber pendapatan desa, Jika ditinjau dari segi potensi wisata dengan belum adanya keseriusan pemerintah desa dalam pengelolaan potensi wisata terjun permandian di Desa Kulango Kabupaten Buol, dengan melihat indikasi banyaknya masyarakat yang belum mengetahui lokasi keberadaanya apalagi di pengaruh oleh sulitnya mencapai tujuan wisata tersebut. Sehingga wisata itu hanya di nikmati oleh

masyarakat disekitarnya saja, Dari segi pertanian adalah tidak dimaksimalkannya pengelolaan kebun desa, dan dari segi ekonomi tidak maksimalnya pengelolaan koperasi desa yang selama ini di kelola oleh pemerintah desa, ini dipengaruhi oleh tidak dilengkapinya peraturan-peraturan desa dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa mengenai tugas, fungsi wewenang pengelolaan sumber – sumber pendapatan desa tersebut, hal ini mengakibatkan adanya tim pang tindihnya job serta wewenang yang dimiliki oleh pemerintah Desa Kulango Kecamatan Lipunoto Kabupaten Buol, Khususnya tentang pengelolaan objek wisata, kebun desa dan koperasi unit desa tersebut.

Dari hal tersebut, di harapkan dan diperlukan suatu manajemen kepala desa dapat menjembatani input masyarakat dengan harapan terciptanya suatu pengelolaan sumber – sumber pendapatan desa yang dapat menunjang pembangunan.

METODE PENELITIAN

Dasar Penelitian ini adalah survey yang bersifat deskriptif. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah: 1. Kepala Kepala Dusun berjumlah 6 orang. 2. Tokoh-Tokoh masyarakat 4 orang. 3. Anggota BPD 7 Orang, 4. Aparat

Pemerintah Desa Kulango 8 Orang. 5. Masyarakat umum khususnya mereka yang berkompeten atau telibat langsung dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa yaitu : 1. Pengelola wisata 20 Orang. 2. Kebun desa 20 Orang 3. Koperasi Unit Desa 10 orang.

Selanjutnya sampel diambil dan ditetapkan secara purposive sampling yaitu dengan cara memilih orang yang diharapkan dapat memberikan informasi dan dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti sehingga jumlah sampel 34 orang. Data yang diperoleh melalui pendekatan kualitatif kemudian dianalisa dan diolah secara kualitatif dengan mempergunakan tabel frekwensi dan presentase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan

Demi tercapainya sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintahan maka dalam setiap perencanaan atau yang biasa di istilahkan sebagai planning bagi administrasi modern adalah suatu gejala yang umum dan mutlak diperlukan terutama bagi pemerintahan desa, Selain urgensinya yang esensial, perencanaan dalam setiap organisasi bagaimanapun juga adalah merupakan fungsi pertama yang harus

dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Sehubungan dengan pandangan di atas maka pihak pemerintah desa kulango dalam menyusun suatu program dalam perencanaan tidak lepas dari masukan dan input masyarakat secara langsung baik melalui Badan perwakilan desa atau Kepala-kepala Dusun dan tokoh-tokoh masyarakat. Dimana hasil dari rapat masyarakat tersebut akan diharapkan dapat melahirkan suatu program yang nantinya memberikan hasil lebih baik.

Seperti diketahui perencanaan merupakan bagian dari manajemen sehingga sangat berpengaruh pada etos atau sistem kerja suatu organisasi.

Manfaat lain yang dirasakan oleh pihak pemerintah desa dengan adanya perencanaan program adalah dapat menentukan langkah yang akan diambil dalam pengelolaan sumber – sumber pendapatan desa tersebut melalui perencanaan yang merupakan proses penentuan tujuan daripada organisasi. Untuk membuat suatu perencanaan program pemerintah desa lebih peka dalam melihat perkembangan apa dan bagaimana selama ini pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa itu sendiri. Untuk itu pemerintah desa harus banyak melakukan koordinasi dengan pihak Badan Perwakilan

Desa, Kecamatan dan instansi terkait melalui suatu program sosialisasi terhadap unsur-unsur yang terkait dalam penanganan masalah sumber-sumber pendapatan desa yang mungkin selama ini kurang dilakukan oleh pihak pemerintahan desa, dengan menyadari bahwa perencanaan itu sangat penting dan berpengaruh bagi pelaksanaan pengelolaan sumber – sumber pendapatan desa dan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan, untuk itu pihak pemerintah desa dalam menyusun suatu program banyak memperoleh masukan-masukan berupa informasi dari masyarakat secara langsung, karena dianggap merekalah yang banyak mengetahui apa yang terjadi di lapangan. Untuk itu dalam hal ini pihak pemerintah desa kulango menyelenggarakan suatu kegiatan yang merupakan suatu langkah dalam perencanaan untuk menjadikan perencanaan sebagai awal bagi pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa dengan juga melibatkan unsur di luar pemerintah desa dengan mengharapkan input yang mengakar pada permasalahan sosial. Kegiatan tersebut di ikuti oleh beberapa unsur dalam masyarakat yang terlibat langsung adapun unsur-unsur masyarakat tersebut antara lain:

- a. Unsur pemerintahan desa
- b. Kepala – Kepala Dusun
- c. Unsur kecamatan
- d. Unsur BPD
- e. Unsur Tokoh-tokoh Agama, Pemuda

Pada tabel berikut ini bagaimana peranan kepala desa dalam melaksanakan dan merumuskan perencanaan pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa

Tabel 1
Tanggapan responden tentang peranan kepala desa dalam perencanaan pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa

| No | Tanggapan Responden | Frekuensi | Persentase |
|---------------|---------------------|-----------|-------------|
| 1 | Sangat Berperan | 2 | 5,88% |
| 2 | Berperan | 10 | 29,41% |
| 3 | Cukup Berperan | 21 | 61,71% |
| 4 | Kurang Berperan | 1 | 2,94% |
| 5 | Tidak Berperan | - | - |
| Jumlah | | 34 | 100% |

Sumber : Data Primer 2024

Dari tabel diatas nampak bahwa tanggapan responden tentang peranan kepala desa dalam perencanaan pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa 2 atau 5,88% responden yang menyatakan sangat berperan 10 responden atau 29,41% yang menyatakan berperan, 21 atau 61,71 responden yang menyatakan cukup berperan dan 1 atau 2,94% yang menyatakan kurang berperan.

Besarnya peranan kepala desa kulango dalam perencanaan pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa melihat

dari fungsi kepala desa sebagai manajerial atau sebagai pimpinan pelaksana teknis dalam pengambil kebijakan dilapangan sehingga memberikan legitimasi kepada kepala desa untuk memberikan arahan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa. Pada tabel berikut ini bagaimana tanggapan responden tentang keterlibatan beberapa unsur komponen dalam perencanaan yang dilaksanakan di desa Kulango dalam menyusun perencanaan perihal pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa.

Tabel 2
Tanggapan responden tentang
keterlibatan beberapa unsur
komponen dalam perencanaan di
Desa Kulango

| No | Tanggapan Responden | Frekuensi | Persentase |
|---------------|-------------------------------------|-----------|-------------|
| 1 | BPD | 9 | 26,47 |
| 2 | Kepala-kepala Dusun | 12 | 35,29 |
| 3 | Kecamatan | 3 | 8,82 |
| 4 | Tokoh-tokoh | 2 | 5,88 |
| 5 | Agama/pemuda Aparat desa lainnya | 8 | 23,52 |
| Jumlah | | 34 | 100% |

Sumber : Data Primer 2024

Dari tabel diatas nampak bahwa tanggapan responden tentang keterlibatan beberapa unsur komponen dalam perencanaan di desa Kulango 9 responden atau 26,47% yang menyatakan dari unsur BPD, 12 responden atau 35,29% yang menyatakan dari unsur Kepala-kepala

dusun, 3 atau 8,82% yang menyatakan dari unsur kecamatan, 2 atau 5,88% dari tokoh pemuda dan masyarakat, 8, atau 23,82% dari unsure aparat desa lainnya. Untuk dapat memperkembangkan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik, mutlak perlu adanya cara yang berencana, yang memuat keinginan dan usaha sadar dalam bentuk rumusan dasar dan pedoman guna suatu tindakan, dengan perkataan lain bahwa perencanaan adalah hasil rangkuman dari kaitan tugas pokok, aturan, gagasan, pengetahuan, dan keadaan atau lingkungan. Dengan demikian berarti perencanaan adalah persiapan kegiatan atau keseluruhan proses pemikiran terhadap hal-hal yang dilaksanakan pada masa yang akan datang secara sistematis dan rasional, perencanaan adalah suatu persiapan yang teratur bagi segala kegiatan organisasi.

Melihat hal tersebut dapat di indikasikan bahwa perencanaan juga memerlukan suatu manajemen yang tepat dalam penerapannya dengan tidak mengesampikan peranan kepala desa. Dengan adanya perencanaan yang dimediasi oleh pemerintah desa khususnya kepala desa maka seharusnya perencanaan tidak terlepas dari faktor waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Bul

dalam hal ini adalah pemerintah kecamatan Lipunoto yaitu minimal 1 tahun sekali dengan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa Kulango. Pada tabel berikut ini bagaimana tanggapan responden tentang rapat perencanaan yang dilaksanakan kepala desa telah sesuai dengan mekanisme dan pedoman

Tabel 3
Tanggapan responden tentang rapat perencanaan yang dilaksanakan kepala desa sesuai dengan mekanisme dan pedoman

| No | Tanggapan Responden | Frekuensi | Persentase |
|---------------|---------------------|-----------|-------------|
| 1 | Sangat Sesuai | - | - |
| 2 | Sesuai | 6 | 17,64% |
| 3 | Cukup Sesuai | 17 | 50,00% |
| 4 | Kurang Sesuai | 8 | 23,52% |
| 5 | Tidak sesuai | 3 | 8,82% |
| Jumlah | | 34 | 100% |

Sumber : Data Primer 2024

Dari tabel diatas nampak bahwa tanggapan responden tentang rapat perencanaan yang dilaksanakan kepala desa telah sesuai dengan mekanisme dan pedoman 6 atau 17,64% responden yang menyatakan sesuai, 17 atau 50,00% yang menyatakan cukup sesuai, 8 atau 23,52% yang menyatakan kurang sesuai dan 3 atau 8,82% yang menyatakan tidak sesuai.

Besarnya tanggapan responden yang menyatakan sesuai dan cukup sesuai diakibatkan bahwa perencanaan telah sesuai dengan instruksi pihak kecamatan Lipunoto, sedangkan responden yang

menyatakan kurang sesuai atau tidak sesuai karena dalam pelaksanaan rapat warga terkadang tidak tepat waktu atau dengan kata lain jadwal rapat biasa diundur sampai beberapa kali dengan berpatokan pada peraturan Badan Perwakilan Desa yang menyatakan rapat tidak qorum apabila tidak dihadiri setengah dari anggota Badan Perwakilan Desa dan aparat pemerintah desa maka tidak dapat dilaksanakan ini diakibatkan anggota-anggota Badan Perwakilan Desa yang berprofesi sebagai petani sangat sibuk jika datang musim tanam dan kesibukan aparat pemerintah desa serta faktor renovasi perbaikan kantor desa yang sementara dilaksanakan.

Pelaksanaan

Pelaksanaan program atau biasa disebut actuating adalah merupakan tindakan-tindakan yang menyebabkan suatu organisasi atau perusahaan menjadi berjalan, Pelaksanaan program adalah bagian yang penting dari proses manajemen. Berlainan dengan perencanaan dan pengawasan dalam pelaksanaan khususnya yang berhubungan dengan unsur-unsur yang terkait yaitu pemerintah desa, Pemerintah Kecamatan, pemerintah Kabupaten, masyarakat, dan

instansi terkait dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa, Untuk itu dalam pelaksanaan program ini sangat penting agar terdapat kesatuan gerak dalam pelaksanaannya.

Berbicara masalah manajemen seorang kepala desa , maka akan terlintas dalam benak kita bahwa akan terjadi suatu kegiatan menggerakan kegiatan pengelolaan yang dilaksanakan oleh kepala desa. Ia akan menggunakan hak dan wewenangnya. Dengan demikian, dalam suatu organisasi pemerintah terkecil seperti di desa, menyangkut keberhasilannya dalam melaksanakan pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa sangat bergantung kepada kemampuan dan profesionalisme dalam menerjemahkan perencanaan kemudian di aplikasikan melalui pelaksanaan, Dengan kata lain, bilamana dalam desa dipegang oleh seorang kepala desa yang berkualitas, memenuhi syarat, inovatif, dan bertanggung jawab, sangat besar kemungkinan berbagai perencanaan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa dan program-program yang diamanatkan dapat diwujudkan. Akan tetapi sebaliknya, bila dalam desa dipegang oleh kepala desa yang jauh dari kemampuannya sebagai

manejer, maka akan kecil kemungkinan ia dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Dalam penulisan ini juga menitik beratkan manajemen kepala desa dalam hal penerimaan dan pengeluaran Keuangan desa dari pengelolaan sumber – sumber pendapatan desa, dimana kepala desa adalah pengelolaan keuangan desa ditinjau dari segi pelaksanaan penerimaan serta pengeluaran tentang penentuan prioritas kebutuhan, pada akhirnya berimplikasi pada pengelolaan sumber – sumber pendapatan desa.

Tabel 4
 Tanggapan responden tentang penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan perencanaan

| No | Tanggapan Responden | Frekuensi | Persentase |
|---------------|---------------------|-----------|-------------|
| 1 | Sangat sesuai | - | - |
| 2 | Sesuai | 6 | 17,64% |
| 3 | Cukup Sesuai | 20 | 58,82% |
| 4 | Kurang Sesuai | 4 | 11,76% |
| 5 | Tidak Sesuai | 3 | 8,82% |
| Jumlah | | 34 | 100% |

Sumber: Data Primer 2024

Dari tabel diatas nampak bahwa tanggapan responden tentang realisasi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan perencanaan 6 atau 17,64% responden yang menyatakan sesuai, 20 atau 58,82% yang menyatakan cukup sesuai, 4 atau 11,76% yang menyatakan kurang sesuai dan 3 atau 8,82% yang menyatakan tidak sesuai.

Melihat tabel diatas maka dapat peneliti simpulkan bahwa penerimaan dan pengeluaran yang ditetapkan oleh kepala desa kulango dari tergantung dari diajukannya draft kebutuhan desa kepada pihak kecamatan Lipunoto khususnya tentang dana rutin dan pembangunan sebagai bagian dari sumber-sumber pendapatan desa walaupun pada saat ini masih banyak kekurangan yang didapatkan ditengah masyarakat, khususnya tentang pembangunan fisik berupa jalan, pengelolaan kebun desa, penambahan modal bagi Koperasi Unit Desa dan renovasi kantor pemerintah desa yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan karena faktor kurangnya dana yang tersedia pada kas desa.

Adanya penunjukan kepala desa sebagai penanggung jawab pengelolaan sumber – sumber pendapatan desa Dalam suatu proses rencana penerimaan dan pengeluaran dalam menunjang pengelolaan sumber – sumber pendapatan desa daerah, kepala desa diperlukan perencanaan yang baik tentu ada rencana penerimaan dan pengeluaran yang akan dihasilkan yang mana rencana penerimaan dan pengeluaran tersebut diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal dalam pelaksanaan pengelolaan sumber – sumber

pendapatan desa khususnya pembangunan desa. Sehingga terwujudnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa secara terpadu, cepat, tepat dan terkendali serta manusiawi dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dalam menunjang pembangunan desa, sehingga rencana penerimaan dan pengeluaran yang menghasilkan optimalnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa dengan harapan dapat menghasilkan:

- Meningkatkan menyempurnakan sarana dan prasarana kerja kantor desa Kulango yang dalam taraf renovasi/pembangunan.
- Meningkatkan kemampuan profesionalisme aparat desa dan masyarakat yang di beri tugas dalam pengelolaan sumber – sumber pendapatan desa.
- Menyempurnakan sistim, mekanisme pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa. Khususnya tentang wewenang pengelolaan dan bagi hasil
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembangunan desa.

Perumusan penerimaan dan pengeluaran yang pada akhirnya menghasilkan kebijakan lebih diarahkan pada upaya pencapaian target kinerja

berdasarkan kesimpulan sumber daya (manusia, dana dan atau teknologi) yang tersedia serta kondisi lingkungan, penerimaan dan pengeluaran haruslah mengintegrasikan semua sumber daya yang tersedia serta kondisi lingkungan. Strategi penerimaan dan pengeluaran haruslah mengintegrasikan semua sumber daya yang tersedia untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang serta mengatasi kelemahan dan tantangan yang dihadapi dengan mengedepankan prioritas.

Prioritas merupakan suatu upaya mendahulukan atau mengutamakan sesuatu dari pada yang lain. Prioritas adalah suatu proses dinamis dalam pembuatan keputusan atau tindakan yang ada saat tertentu dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan tersebut. Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan, tetapi juga menentukan skala atau peringkat program atau kegiatan yang harus dilakukan lebih dahulu dibandingkan program atau kegiatan yang lain. Dengan melihat tabel dibawah ini bagaimana kita mengetahui tanggapan responden tentang pengambilan keputusan kepala desa

kulango sebagai pelaksana teknis atau penanggung jawab pengelolaan sumber-

sumber pendapatan desa, dalam hal perencanaan pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa telah dapat meningkatkan kinerja pengelolaan sumber – sumber pendapatan desa

Tabel 5
Tanggapan Responden tentang pengambilan keputusan kepala desa Dalam Pengelolaan Sumber-sumber pendapatan desa telah dapat meningkatkan kinerja pengelola sumber-sumber pendapatan desa

| No | Tanggapan Responden | Frekuensi | Persentase |
|---------------|---------------------|-----------|-------------|
| 1 | Sangat Baik | 3 | 8,82% |
| 2 | Baik | 7 | 20,58% |
| 3 | Cukup Baik | 14 | 41,17% |
| 4 | Kurang Baik | 5 | 14,70% |
| 5 | Tidak Baik | 5 | 14,70% |
| Jumlah | | 34 | 100% |

Sumber: Data Primer 2024

Dari tabel diatas, nampak bahwa tanggapan responden tentang pengambilan keputusan kepala desa dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa telah dapat meningkatkan kinerja pengelola sumber-sumber pendapatan desa dengan tanggapan responden 3 atau 8,82% responden yang menyatakan sangat baik, 7 atau 20,58% yang menyatakan baik, 14 atau 41,17% yang menyatakan cukup baik, 5 atau 14,70% yang menyatakan kurang baik dan 5 atau 14,70% yang menyatakan tidak baik.

Berdasarkan tabel diatas memberikan gambaran bahwa kepala desa

dalam pengambilan keputusan cukup baik dalam meningkatkan kinerja pengelola sumber-sumber pendapatan desa yang terdiri dari aparat desa serta masyarakat yang diberi tugas akan hal tersebut walaupun ada beberapa responden yang menyatakan baik atau tidak baik ini dipengaruhi oleh beberapa keputusan kepala desa lebih menguntungkan beberapa person atau mereka yang ditugaskan dalam pengelolaan tidak aktif lagi dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa dan masih diberikan wewenang untuk mengelola sedangkan penunjukannya langsung dilakukan oleh kepala desa.

Namun demikian, bila direnungkan secara mendalam, keberhasilan dalam suatu organisasi khususnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa bukan hanya ditentukan oleh seorang kepala desa semata, melainkan mutlak mendapatkan dukungan atau partisipasi dari seluruh komponen lapisan masyarakat dan bawahan. Tanpa adanya dukungan yang cukup dari para bawahan maka posisi kepala desa sebagai pemegang teknis pengelolaan sumber – sumber pendapatan desa tidak lebih hanya sebatas simbol belaka. Oleh karena itu, sebagai seorang kepala desa harus memiliki berbagai

potensi yang cukup sehingga diharapkan dapat menggerakan masyarakat dan bawahan.

Selain itu usaha pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa merupakan upaya dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, dan mengembangkan desa yang dimotori oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa yang ada dan memenuhi persyaratan tertentu dan mempunyai program, upaya, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, dan meningkatkan pendapatan desa dan tentu saja harus tetap melaksanakan koordinasi dengan pihak pemerintah kecamatan dan badan perwakilan desa khususnya tentang dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa tersebut melalui beberapa tahap mulai dari perencanaan yang dilaksanakan setahun sekali dalam rapat desa, tata cara pelaksanaan pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa, pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan dan masyarakat secara langsung melalui Badan perwakilan desa serta pelaporan berkala yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai pelaksana teknis pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa.

Tabel 6
Pendapatan asli Desa Kulango 2023 – 2024

| No | Pendapatan Asli Desa Kulango | Tahun | | | Ket |
|--------|--------------------------------------|------------|------------|------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Kebun Desa | 5,298.000 | 5,298.000 | 5,298.000 | - |
| 2 | Wisata, Air terjun Tirta Ria Kulango | 125.000 | - | - | Dipergunakan pada saat Kemah Pelajar |
| 3 | Koperasi Unit Desa | 11,265,731 | 11,471,260 | 11,127,410 | - |
| 4 | Swadaya/Partisipasi Masyarakat | - | - | - | Tidak ada datanya Karena ditangani langsung oleh Kades |
| Jumlah | | 16,688.731 | 16,769.260 | 16,425.410 | |

Sumber: Ketua BPD Kulango, 2024

Dalam rangka mengupayakan pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa di perlukan peningkatan kualitas personal dan transparansi pengelolaan sumber – sumber pendapatan desa untuk menunjang pelaksanaan pembangunan, maka selaku kepala desa kulango senantiasa berusaha :

- Untuk selalu memberikan arahan yang positif kepada para bawahan atau aparat pemerintah desa dan lebih khusus kepada warga masyarakat setempat yang dipercayakan mengelola sumber-sumber pendapatan desa. arahan ini bukan hanya ditunjukkan melalui pola pikir dan tata laku, melainkan juga aspek motivasi untuk selalu bekerja keras, bertanggung jawab dan loyal tidak luput

selalu diusahakan ditanamkan dalam diri aparat desa.

- Kepala desa Kulango juga seharusnya berusaha bersikap transparansi dalam setiap permasalahan tentang pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa. Khususnya tentang penerimaan dan pengeluaran Terkait dengan hal ini kepala desa Kulango senantiasa melaksanakan pedoman pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa, melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa.

Berkaitan dengan hal ini, kepala desa sebagai pemimpin di suatu desa haruslah mempunyai kemampuan untuk dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dimasyarakat akibat kemajemukan suku dan budaya serta karakter yang berbeda-beda antara suku yang satu dengan lainnya akan diungkapkan pernyataan responden terhadap kemampuan kepala desa setempat dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat.

Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang paling mendasar dan harus dilaksanakan. Dalam penerapan pengawasan dalam suatu program, itu merupakan salah satu bentuk pembinaan.

Seorang pimpinan bukan mendominasi atau menguasai bawahannya apabila dilakukan pengawasan, melainkan bertujuan memberikan bimbingan dan arahan supaya apa yang telah direncanakan dapat tercapai. Pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala desa kulango terhadap tindak lanjut dari pengelolaan sumber – sumber pendapatan desa adalah beracuan dari aturan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan pihak kepala desa kulango lebih menitik beratkan pada aspek penertiban dimana dalam melakukan pengawasan keterlibatan kepala desa lebih dominan, sehingga efektif tidaknya suatu pengawasan tergantung dari kinerja pemerintah desa dan kepala desa, pada saat ini pengawasan bersifat periodik dimana pengawasan dilakukan oleh kepala desa.

Pengawasan yang langsung dilakukan oleh kepala desa dengan mendatangi langsung lokasi dan melihat langsung hasil pengelolaan sumber – sumber pendapatan desa, apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum. Dengan ini jelas dapat dilihat dan diketahui perkembangan dan kemajuan dari pembangunan tersebut, Pengawasan langsung yang dilaksanakan kepala desa lebih mempertegas kepala desa sebagai eksekutif juga untuk menghindari

penyimpangan-penyimpangan sejak dulu, sehingga diharapkan dengan adanya pengawasan langsung dapat mengendalikan serta memberikan sumbangsih yang lebih efisien dan efektif Untuk pengelolaan sumber – sumber pendapatan desa sehingga dari hal tersebut berlangsungnya

Tabel 7
Tanggapan Responden Tentang
Pengawasan yang dilakukan kepala
Desa kulango

| No | Tanggapan Responden | Frekuensi | Persentase |
|---------------|---------------------|-----------|-------------|
| 1 | Sangat aktif | 2 | 5,88% |
| 2 | Aktif | 11 | 32,35% |
| 3 | Cukup aktif | 18 | 52,94% |
| 4 | Kurang aktif | 3 | 8,82% |
| 5 | Tidak aktif | - | - |
| Jumlah | | 34 | 100% |

Sumber : Data Primer 2024

Dari tabel diatas nampak bahwa tanggapan responden tentang pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa dalam pelaksanaan pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa dengan tanggapan responden 2 atau 5,88% responden yang menyatakan sangat aktif, 11 atau 32,35% yang menyatakan aktif, 18 atau 52,94% yang menyatakan cukup aktif 3 atau 8,82% yang menyatakan kurang aktif sehingga penulis menyimpulkan bahwa kepala desa cukup aktif dalam melakukan pengawasan.

KESIMPULAN

1. Perencanaan program desa diantaranya tentang sumber – sumber pendapatan desa yang dilaksanakan di desa kulango melibatkan beberapa unsur pemerintah desa, kecamatan serta masyarakat seperti Badan Perwakilan desa, tokoh – tokoh pemuda, tokoh – tokoh agama, kepala-kepala dusun dan dilaksanakan minimal 1 tahun sekali dalam rapat perencanaan desa
2. Besarnya peranan kepala desa kulango dalam perencanaan pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa melihat dari fungsi dan tugas kepala desa sebagai pimpinan pelaksana teknis dalam mengambil kebijakan dilapangan.
3. Perencanaan yang dirumuskan dalam rapat desa juga meliputi mekanisme perencanaan penerimaan dan pengeluran kas desa serta penentuan skala prioritas kebutuhan dalam menunjang pengelolaan sumber – sumber pendapatan desa.
4. Pelaksanaan pengelolaan sumber – sumber pendapatan desa dilaksanakan oleh kepala desa sebagai pimpinan teknis dengan aparat pemerintah desa lainnya serta mereka yang diberikan wewenang oleh kepala desa.
5. Pelaksanaan pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa meliputi dana penerimaan rutin dan pembangunan dari tahun 2022 – 2024 tidak mengalami perubahan atau jumlah angka nominalnya tetap, sedangkan sumber pendapatan lainnya seperti kebun desa, Koperasi unit desa dan wisata air terjun pada tahun 2023 mengalami peningkatan pendapatan dari tahun 2022, dan pada tahun 2024 mengalami penurunan pendapatan dari tahun 2023
6. Sumber – sumber pendapatan asli desa yang terdapat di desa kulango selain dari anggaran rutin dan pembangunan juga melalui sumber pendapatan lainnya seperti Wisata air terjun dan kebun desa. Dan Koperasi Unit Desa
7. Pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala desa dalam pengelolaan sumber – sumber pendapatan desa Kulango meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Buchari Zainun, 1990, *Administrasi Dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia* PT. Gunung Agung Jakarta.

Dedy Supriady Brata Kusumah, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah ”Strategi Menggali Potensi Dalam*



JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK POLICY REFORM

VOLUME 4 NOMOR 1 FEBRUARI TAHUN 2025

Mewujudkan Otonomi daerah, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta.

Hadari Nawawi, 1997, *MSDM, Bisnis Yang Kompetitif* UGM Yogyakarta

Marihot P. Siahaan, 2006, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* PT. RajaGrafindo Persada jakarta.

M. Manullang, 1990, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia Jakarta

....., 1996, *Dasar-Dasar Manajemen*, Galia Indonesia

Sarwoto, 1988, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*, Galia Indonesia

Soerjono Soekanto 1986, *Sosiologi Suatu Pengantar* Rajawali Pers Jakarta

Soewarno Handayaningrat, 1990, *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*, CV. HJ Masagung Jakarta.

Sondang P Siagian, 1996, *Filsafat Administrasi*, PT Gunung Agung Jakarta

Soedjadi, 1998, *Organisasi dan Metode Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen*, Haji Mas Agung, Jakarta.

Soedaryo, 1984, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, N. V. Eresco, Bandung.

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta Bandung

Yuswar Zainal basri dan Mulyadi, 2005, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. PT RajaGarfindo Persada Jakarta.

W.J.S Poerwardarminta 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika Jakarta.

Undang-Undang No 33 Tahun 2004, *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Arkola Surabaya, 2004

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.